

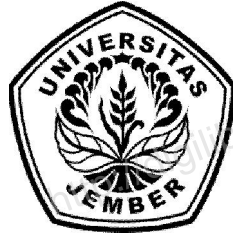
**PASANG SURUT HUBUNGAN POLITIK AUSTRALIA –
INDONESIA PADA TAHUN 1996 – 2007**

SKRIPSI

Oleh

**Rita Indriani
NIM 060110301025**

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SAstra
UNIVERSITAS JEMBER
2011**



**PASANG SURUT HUBUNGAN POLITIK AUSTRALIA –
INDONESIA PADA TAHUN 1996 – 2007**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Sejarah (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sastra

Oleh

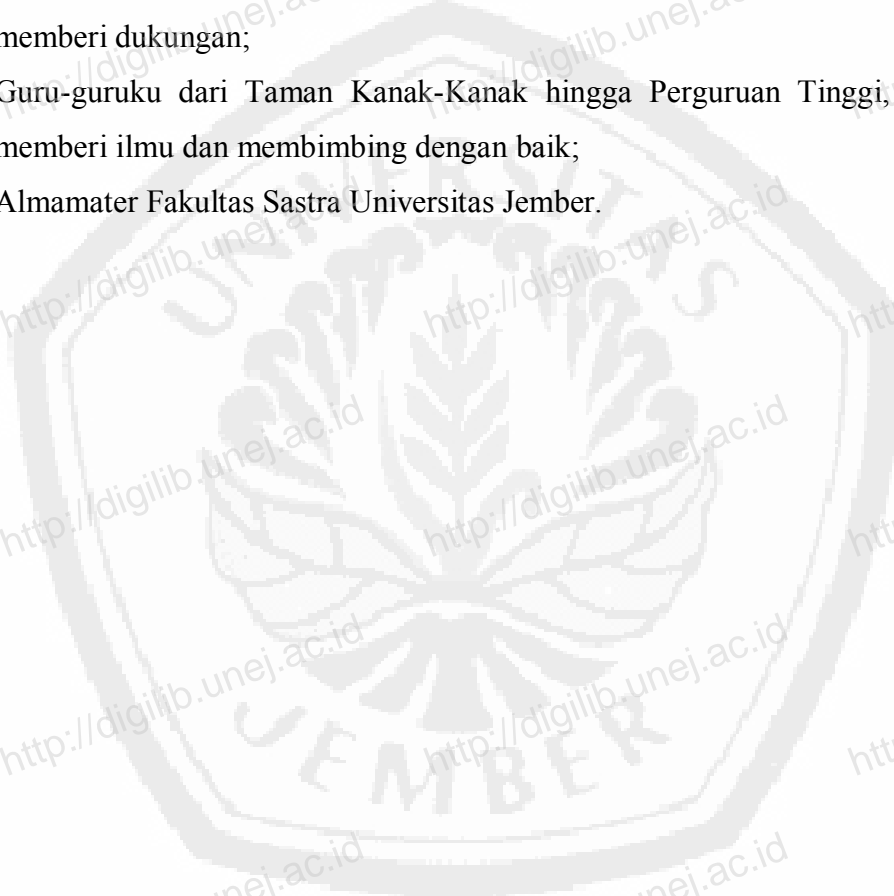
Rita Indriani
NIM 060110301025

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS JEMBER
2011**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Indah Resminingsih dan Ayahanda Mohammad Jaenollah, yang telah mendo'akan dan memberi dukungan;
2. Kakakku tersayang Bambang Hadi Wiranata, yang juga telah mendo'akan, dan memberi dukungan;
3. Guru-guruku dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberi ilmu dan membimbing dengan baik;
4. Almamater Fakultas Sastra Universitas Jember.



MOTTO

Politik luar negeri Indonesia harus ditentukan oleh kepentingan kita sendiri dan dijalankan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang kita hadapi... Garis-garis politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negara lain yang diputuskan berdasarkan atas kepentingan negara tersebut.

(Mohammad Hatta, *Mendayung Antara Dua Karang*, 1948)

Relations between groups from different civilizations however will be almost never close, usually cool and often hostile.

(Hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda peradaban bagaimanapun nyaris tidak akan pernah dekat, biasanya dingin dan seringkali dalam perselisihan)
(Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order*, 1996)

The times will suit me. (Saat-saatnya akan sesuai denganku)
(John Howard, Juli 1986)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Rita Indriani

NIM : 060110301025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Pasang Surut Hubungan Politik Australia – Indonesia Pada Tahun 1996 – 2007* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Desember 2011

Yang Menyatakan,

Rita Indriani

NIM 060110301025

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pasang Surut Hubungan Politik Australia – Indonesia Pada Tahun 1996 – 2007* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Sastra Universitas Jember pada:

Hari : Jumat

tanggal : 2 Desember 2011

tempat : Ruang Ujian Fakultas Sastra Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Drs. I.G Krisnadi, M. Hum.

NIP 196202281989021001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Parwata, M. Hum.

NIP 195308011985031002

Sunarlan, SS., M.Si.

NIP 196910112006041001

Mengesahkan

Dekan,

Drs. Syamsul Anam, M.A.

NIP. 195909181988021001

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pasang Surut Hubungan Politik Australia – Indonesia Pada Tahun 1996 – 2007*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini pada kenyataannya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Nawiyanto, M. A. selaku dosen yang telah memberikan inspirasi awal saat sedang berdiskusi kecil, petunjuk dalam memperoleh sumber relevan di Jakarta, serta dukungan untuk penulisan skripsi ini;
2. Drs. IG. Krisnadi, M. Hum., Drs. Parwata, M. Hum., dan Sunarlan, SS., M.Si. selaku dosen pembimbing sekaligus penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Ikwan Setiawan, selaku dosen jurusan Sastra Inggris yang telah berupaya membantu dalam pencarian sumber sejarah ketika di Yogyakarta.
4. Dra. Siti Sumardiati, M. Hum. selaku dosen yang memberikan dukungan serta pinjaman buku-buku;
5. Dra. Latifatul Izzah, M. Hum. selaku dosen pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa;
6. Ibu dan kakak terkasih yang telah memberi do'a, semangat dan dukungan;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 2 Desember 2011

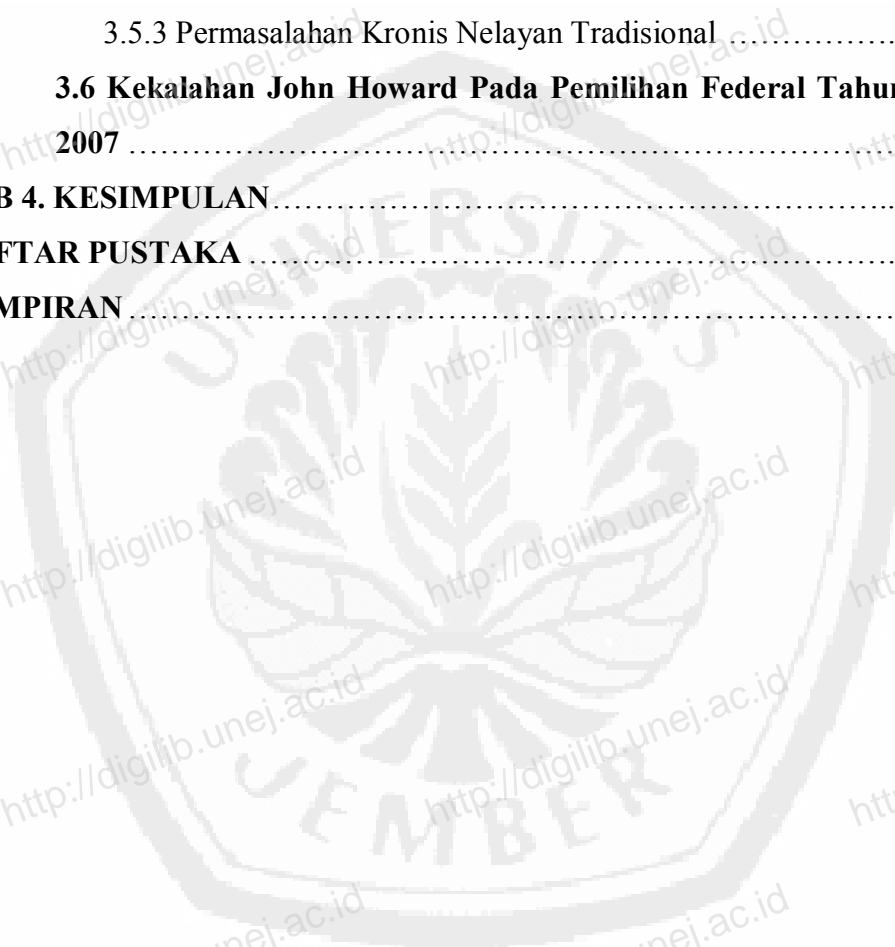
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat	8
1.4 Tinjauan Pustaka	9
1.5 Kerangka Teori	11
1.6 Metode Penelitian	17
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB 2. LATAR BELAKANG HUBUNGAN BILATERAL AUSTRALIA – INDONESIA	20
2.1 Australia dan Indonesia dari Berbagai Faktor	20
2.1.1 Faktor Keamanan	20
2.1.2 Faktor Ekonomi	28
2.1.3 Faktor Politik	33
2.1.4 Faktor Sosial Budaya	38

2.2 Profil Kepemimpinan	43
2.2.1 John Howard	43
2.2.2 Soeharto	45
2.2.3 B. J. Habibie	46
2.2.4 Abdurrahman Wahid	47
2.2.5 Megawati Soekarnoputri	49
2.2.6 Susilo Bambang Yudhoyono	51
2.3 Tinjauan Historis Hubungan Politik Bilateral Australia – Indonesia	52
2.3.1 Sejarah Singkat Hubungan Politik Bilateral (1940an – 1990an)	52
2.3.2 Masa Emas Hubungan Politik Bilateral (1991 – 1996)...	60
BAB 3. HUBUNGAN POLITIK BILATERAL AUSTRALIA – INDONESIA PADA TAHUN 1996 – 2007	67
3.1 Hubungan Bilateral Pada Awal Kepemimpinan Perdana Menteri John Howard	68
3.1.1 Pentingnya Indonesia Bagi Australia	68
3.1.2 Penguatan Hubungan Bilateral	74
3.2 Dampak Krisis di Indonesia Terhadap Hubungan Bilateral	76
3.2.1 Tanggapan Awal Pemerintah Australia Terhadap Krisis Ekonomi Indonesia	76
3.2.2 Perubahan Sikap Pemerintah John Howard Terkait Masalah Timor-Timur	80
3.2.3 Kegagalan Persetujuan Pemeliharaan Keamanan 1995 Dan Perjanjian Batas Maritim 1997.....	93
3.3 Normalisasi Hubungan Politik Bilateral	97
3.4 Masalah Keamanan dan Pertahanan Teritorial	102
3.4.1 Krisis Imigran Gelap	102

3.4.2 Permasalahan Terorisme	109
3.5 Hubungan Bilateral Pasca Pemilihan Umum di Kedua Negara Tahun 2004	121
3.5.1 Permasalahan Schapelle Corby	121
3.5.2 Permasalahan Papua	130
3.5.3 Permasalahan Kronis Nelayan Tradisional	143
3.6 Kekalahan John Howard Pada Pemilihan Federal Tahun 2007	149
BAB 4. KESIMPULAN	154
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN	179



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Tugas Penelitian	179
Lampiran 2. Peta Australia dan Indonesia	180
Lampiran 3. Daftar Kerjasama Bilateral Australia – Indonesia di Tengah Pasang Surut Hubungan Politik Bilateral	181
Lampiran 4. Pernyataan Pers Bersama Tentang Peresemian Kerja sama Australia – Indonesia Developepment Area (AIDA)..	187
Lampiran 5. Surat Perdana Menteri John Howard Untuk Presiden B. J. Habibie Terkait Masalah Timor-Timur	190
Lampiran 6. Surat Pengesahan dan Pembatalan Persetujuan Pemeli- haraan Keamanan Tahun 1995	192
Lampiran 7. Pidato Sambutan Perdana Menteri John Howard Atas Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid Tahun 2001	196
Lampiran 8. Komunike Bersama Antara Perdana Menteri John Howard dan Presiden Megawati Soekarnoputri Tahun 2001	199
Lampiran 9. Pernyataan Bersama Tentang Kemitraan Komprehensif Antara Australia dan Indonesia Tahun 2004	201
Lampiran 10. Kartun-Kartun yang Memanaskan Hubungan Bilateral Pada Tahun 2006	204
Lampiran 11. Daftar Serangan Teror di Indonesia Tahun 1996-2007..	207
Lampiran 12. Perjanjian Lombok Antara Pemerintah Australia dan Indonesia Tahun 2006	209
Lampiran 13. MoU BOX 1974 Tentang Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia	213

DAFTAR SINGKATAN

ABC	: Australian Broadcasting Cooperation
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ACTU	: Australia Council of Trade Unions
ADF	: Australian Defence Force
AELM	: APEC Economic Leaders' Meeting
AFP	: Australia Federal Police
AIDA	: Australian – Indonesian Development Area
AII	: Australia Indonesia Institute
AMIS	: Australian Maritime Identification System
AMIZ	: Australian Maritime Identification Zones
AMS	: Agreement on Maintaining Security
ANZUS	: Australia, New Zealand, United States of America
APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASEM	: Asia-Europe Meeting
ASIO	: Australia Security Intelligent Organization
AusAID	: Australian Agency for International Development
AUSMIN	: Australia – United States Ministerial
AWPA	: Australia West Papua Association
BIM-EAG	: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine East Asean Growth Triangle
BPC	: Border Protection Command
BRMMC	: Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CNRT	: Conselho Nacional da Resistencia Timorese
DFAT	: Department of Foreign Affairs and Trade
DIFF	: Development Import Financial Facilities

DIMIA	: Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FPDA	: Five Power Defence Arrangements
GINSI	: Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia
GOLKAR	: Golongan Karya
HRW	: Human Right Watch
IAMF	: Indonesia – Australia Ministerial Forum
IMF	: International Monetary Fund
IMS-GT	: Indonesia, Malaysia, Singapore Growth Triangle
IMT-GT	: Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle
INTERFET	: Interim Force For East Timor
JCLEC	: Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation
JORN	: Jindalee Operational Radar Network
KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Kopassus	: Komando Pasukan Khusus Indonesia
MoU	: Memorandum of Understanding
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
RAR	: Royal Australian Regiment
SAS	: Special Air Service
SIJORI	: Singapore, Johor, Riau
TNCC	: Transnational Crime Coordination Centre
TSP	: Transfer of Sentenced Person
UNAMET	: The United Nation Mission in East Timor
UNTAET	: United Nations Transitional Administration in East Timor
WPA-A	: West Papua Action Australia

BAB 4. KESIMPULAN

Pada periode kepemimpinan Perdana Menteri John Howard di Australia tahun 1996 - 2007, hubungan politik bilateral dengan Indonesia pada kenyataannya tidak sebaik hubungan politik bilateral saat Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Paul Keating tahun 1991 - 1996. Berdasarkan pemahaman terhadap kasus pasang surut hubungan bilateral Australia – Indonesia antara tahun 1996 – 2007, diperoleh keterangan jelas tentang adanya reaksi-reaksi dari dua negara terkait isu-isu sensitif. Selain itu, juga dapat diperhatikan bahwa Australia memainkan peranan yang sangat besar dalam menentukan arah dan nasib hubungan bilateral. Hal tersebut diindikasikan dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan Australia terhadap Indonesia selama kurun waktu tersebut. Perubahan sikap dan kebijakan Australia terhadap Indonesia dirasakan pertama kali saat Indonesia menjadi negara yang terpuruk karena krisis, yakni dengan keterlibatannya dalam permasalahan Timor-Timur pada tahun 1999. Kebijakan Perdana Menteri John Howard tentang Timor-Timur itu ironis dengan sikapnya sebelum Indonesia terkena dampak krisis, yang saat itu dirinya sering menghindari wacana tentang Timor-Timur. Pada masa selanjutnya, hubungan bilateral ibarat terkena penyakit kronis. Sekalipun ada upaya normaslisasi dan sekalipun hubungan bilateral tidak selalu dalam situasi buruk, antara kedua negara masih sering diliputi sikap saling curiga. Di samping itu, kedua negara pada akhirnya juga terkesan sering membenarkan pandangannya masing-masing. Isu-isu terkait kedua negara menjadi lebih sensitif karena sulitnya timbul persepsi yang sama antara kedua negara. Apalagi, pihak yang sering berbenturan tidak hanya pada tataran pemerintah, tetapi juga antara publik dan pemerintah, bahkan antara sesama publik. Hanya dengan adanya tuntutan kebutuhan bersama, kedua negara menjadi *inseparable partner* atau mitra yang tak terpisahkan, seperti dalam kasus memerangi terorisme bersama. Namun tetap saja hingga kedua negara tidak mempunyai ikatan melalui perjanjian yang menjamin kepentingan bersama, sikap saling curiga pada kenyataannya bukan hal yang asing bagi keduanya.

Dalam kasus hubungan bilateral Australia – Indonesia, sikap dan kebijakan luar negeri Australia sudah jelas merupakan faktor utama dalam mempengaruhi baik tidaknya hubungan bilateral. Bukan dari Indonesia, karena pada kenyataannya Indonesia sedang terus memperbaiki kondisi domestiknya pasca krisis, sehingga pandangan ke luar tidak seoptimal Australia. Lagipula, Indonesia terlihat tidak terlalu memusingkan Australia seperti Australia memusingkan Indonesia. Kebijakan pemerintah Australia terhadap Indonesia, khususnya terkait dengan isu-isu bersama akhirnya dapat diterjemahkan sebagai kebijakan dalam bentuk yang oportunis, pragmatis dan konservatif.

Kebijakan pemerintah Australia dikatakan oportunis karena pada dasarnya pemerintah Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri John Howard tampak lihai memanfaatkan kesempatan yang bagus untuk meraih keuntungan terbaik bagi kepentingan bangsanya. Ambil contoh dalam permasalahan Timor-Timur tahun 1999, Perdana Menteri John Howard memanfaatkan peluang krisis di Indonesia untuk mendukung referendum di Timor-Timur. Masih dalam sifat yang sama, Perdana Menteri John Howard juga memanfaatkan peluang gempa di Yogyakarta pada Mei 2006 untuk berkomunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah hubungan bilateral memburuk karena masalah pemberian visa perlindungan sementara kepada 42 warga Indonesia asal Papua oleh Departemen Imigrasi Australia. Secara lebih general, sikap oportunis pemerintah Australia, khususnya Perdana Menteri John Howard, tampak jelas ketika akan menghadapi pemilihan umum federal. Berbagai opini dan tekanan publik di Australia tampak dimanfaatkan dengan baik oleh Perdana Menteri John Howard untuk meningkatkan popularitasnya. Sekalipun harus merubah haluan kebijakan luar negeri dengan bersikap tidak bersahabat terhadap Indonesia, Perdana Menteri John Howard tetap melakukannya demi mempertahankan kekuasaannya. Seperti saat menghadapi pemilihan umum tahun 2001, pemerintah Australia mengubah kebijakannya tentang imigran gelap dengan menolak mereka memasuki wilayah Australia. Kemudian saat menghadapi pemilihan federal tahun 2004, Perdana Menteri John Howard mengemukakan

gagasan *pre-emptive strike* atau serangan mendahului terhadap teroris di negara-negara Asia Tenggara.

Selanjutnya pemerintah Australia dianggap pragmatis, karena pemerintah Australia tampak menganut pandangan yang selalu membenarkan kebijakannya dengan didasarkan bukti-bukti mendukung, serta berorientasi pada adanya manfaat praktis untuk negaranya. Dalam permasalahan Timor-Timur sikap tersebut juga tampak. Contoh lainnya tampak dalam kasus imigran gelap tahun 2001. Pemerintah Australia menolak dengan keras imigran gelap dari Timur Tengah yang berupaya memasuki wilayah Australia untuk mencari suaka politik. Di tengah penolakan itu, pemerintah Australia, khususnya Perdana Menteri John Howard justru melakukan diplomasi megafon dengan menyatakan bahwa masalah tersebut adalah tanggung jawab Indonesia dan Norwegia. Dalam persoalan itu, pemerintah Australia jelas bersikap pragmatis dan seolah tidak ingin menerima kerugian dan dampak sosial lebih jauh untuk negaranya. Sikap pragmatis pemerintah Australia juga tampak saat menanggapi permasalahan terorisme. Demi menciptakan keamanan di kawasan, khususnya di negaranya, pemerintah Australia merasa perlu untuk memerangi terorisme secara bersama. Demikian juga dalam masalah pemberian visa sementara terhadap 42 warga Papua, sikap pragmatis pemerintah Australia masih tampak. Sekalipun jelas mengetahui kalau pemberian visa sementara akan menyinggung Indonesia, pemerintah Australia tetap bersikukuh membenarkan kebijakan tersebut demi alasan menjalankan amanat konvensi PBB tahun 1951. Padahal pada kasus imigran gelap tahun 2001, pemerintah Australia justru berani melanggarnya. Selanjutnya, termasuk dalam permasalahan nelayan tradisional, pemerintah Australia juga bersikap pragmatis. Demi kedaulatan negara seutuhnya, pemerintah Australia berupaya menekan dan seolah tidak memberi kesempatan nelayan tradisional Indonesia untuk memasuki perairan utara Australia sekalipun berdasarkan fakta historis, nelayan tradisional secara turun menurun telah melakukan aktifitas kelautan di perairan Australia serta berdasarkan MoU BOX 1974, Australia juga telah